PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2010

PERMENHUB NO. 86 TAHUN 2010, 7 HLM.

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, kinerjanya perlu dilaporkan kepada publik secara akuntabel dan pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan mempunyai tanggung jawab atas rencana kinerja dan pencapaian kinerjanya serta dalam rangka peningkatan dan pengendalian capaian kinerja di tiap unit kerja sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan mengenai penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 7 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; KEPLAN No. 239.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi sistematika dan materi laporan akuntabilitas kinerja, bentuk laporan, waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja, dan prosedur dan pendistribusian laporan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010.

Lampiran : 4 hlm.